

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Penelitian

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, cipta, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Dalam perkembangannya, disepakati berbagai macam HKI yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade* – GATT) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HAKI yaitu :

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*).
2. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).

¹ Budi Agus Riswandi dan m. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. V.*

3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
5. Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varietas tanaman.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics Integrated Circuits*).
7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

“Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreatifitas manusia secara ekonomis, oleh karena itu objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.”²

Indonesia memiliki keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agamayang secara keseluruhan harus dilindungi oleh negara. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang.

Kekayaan tersebut di lindungi dalam Pasal 570 KUHPdata yang berbunyi :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan.”

Dilihat bahwa pernyataan umum Hak-Hak Asasi Manusia ini justru meletakan dasar keseimbangan antara Pencipta dengan hak setiap orang terhadap karya ciptaan.

² Sudaryat (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm15

Para pencipta yang menghasilkan karya cipta akan mendapatkan dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan “hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat di hilangkan atau di hapus dengan alasan apapun. Antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya.”³

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui UU No.7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk menharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang HKI. “hak Cipta sebagai dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam peraktiknya, mengharmonisasi UU No. 12 Tahun 1997 dengan UU No. 19 Tahun 2002.”⁴

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menurut penjelasan UU No. 28 Tahun 2014 bahwa:

“Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Hak Cipta dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak terkait”.

³ *Ibid, hlm.69*

⁴ *Ibid,hlm.1.*

Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya di sebut UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau music dengan atau tanpa teks drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari transformasi.

Hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 40 butir 1 Undang - Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis sebagai berikut:

(1) Ciptaan yang dilindungi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu Pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;

- h. Karya Arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Secara spesifik, Undang-Undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain

- 1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- 2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media radio, media audio visual dan/ atau sarana telekomunikasi;

3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau Mediasi;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak ;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik dipengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung ;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk yang menggunakan sarana berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program komputer.

untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, dalam tulisan ini pembahasannya akan dikhususkan pada Hak Cipta atas hasil fotografi yang berupa foto. Dalam proses terjadinya foto saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, karya foto dapat timbul dari hasil kreatifitas fotografer itu sendiri atau lahir dari suatu hubungan kerja yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk foto prewedding atau untuk iklan-iklan produk yang memerlukan adanya media

visualisasi yang berupa karya foto. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta yang berupa foto tersebut.

Sengketa atas pelanggaran hak cipta dapat berlangsung dimana saja baik di Indonesia maupun di luar negeri. Foto dari hasil karya fotografer Indonesia dapat dengan mudah diakui hak ciptanya oleh fotografer lain di Indonesia maupun di luar negeri. Hal itu dikarenakan saat ini banyak dari fotografer yang memajang hasil karyanya di berbagai situs internet seperti situs-situs jejaring sosial yang banyak ada saat ini seperti instagram atau website. Media internet adalah salah satu cara yang paling mudah untuk memamerkan hasil karya seorang fotografer secara luas, namun penuh resiko hasil karyanya akan diakui oleh pihak lain yang dengan sengaja mengubah identitas pemilik untuk keperluan pribadinya.

Pameran yang dilakukan oleh para fotografer saat ini seringkali menggunakan media internet sebagai salah satu media dalam memamerkan hasil karyanya, hal itu merupakan salah satu kemajuan dalam bidang teknologi, dilihat dari sisi positif hal ini sangat berpengaruh baik untuk fotografer maupun bagi para calon pemakai jasa fotografi, namun hal ini juga memiliki sisi negatif yaitu adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan bagi pihak fotografer maupun pihak yang memakainya, karena pihak tersebut menggunakan hak orang lain untuk kepentingannya pribadinya. Hal ini jelas sekali akan dapat menimbulkan sengketa karena adanya pemalsuan dalam pengakuan hak cipta pada sebuah karya seni. Seperti dalam hal penayangan potret Omesh dan anjing peliharaannya Frodo oleh Trans 7 di acara Hitam

Putih yang tanpa seijin dan sepengetahuan oleh fotografernya yaitu Dani dari DUV Project yang memotret dan mempublikasikannya di Website dan instagram pribadinya. Potret ini di ambil dari pihak Trans 7 dari akun Instagram pribadi omesh tanpa sepengetahuan omesh sendiri. Pihak Trans 7 sendiri tidak mempublikasikannya fotografernya dalam acara Hitam Putih yang saat itu bintang tamunya adalah Omesh. Dan identitas dari fotografer sendiri tidak di cantumkan di acara Hitam Putih tersebut dan mengakibatkan kerugian hak moral dan hak ekonomi pada Dani dan DUV Project.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan, maka dikemukakanlah penelitian dengan tema hak cipta dengan mengambil judul :**Perlindungan Hukum Terhadap Foto “Omesh Dan Frodo” Di Acara Hitam Putih Trans 7 Di hubungan Dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektivitas Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap permasalahan foto “Omesh dan Frodo” ?
2. Mekanisme apa yang dapat dilakukan oleh DUV Project selaku pembuat karya foto omesh atas penayangannya di acara hitam putih tanpa lisensi dari fotografernya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
3. Bagaimana Menyelesaikan Permasalahan yang terjadi atas kasus Penayangan foto “Omesh dan Frodo” di Acara Hitam Putih di Trans 7 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap permasalahan foto “Omesh dan Frodo”.
2. Untuk mengetahui Mekanisme yang dilakukan oleh DUV Project selaku pembuat karya foto omesh atas penayangannya di acara hitam putih tanpa lisensi dari fotografernya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi atas kasus penayangan foto “Omesh dan Frodo” di Acara Hitam Putih di Trans 7.

4. D.Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat di peroleh kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan informasi kepada instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang “Hak Cipta”.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- b. Untuk memberikan pengetahuan bagi para fotografer tentang perlindungan atas hasil karyanya di bidang fotografi.

- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang fotografi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan falsafah Negara mencantumkan nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua tersirat “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila ke empat “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, menjadi Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Indonesia sebagai negara hukum di pertegas oleh Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri – ciri atau unsur – unsur dari negara hukum adalah :⁵

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang – wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasaan.
2. Asas legalitas. Sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak – hak asas ini betul – betul terlindungi adalah pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundangan-perundangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 23.

Berdasarkan pemaparan di atas di hubungkan dengan tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang – undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke empat bahwa:

Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Isi makna dari pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 tujuan dan terbagi 2 yakni tujuan umum dan tujuan khusus yaitu :⁶

1. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm 160

- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan hukum;
2. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian dan keadilan sosial.

H.R Otje Salman dan Anthon F.Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea ke empat yaitu :⁷

“Pembukaan Alinea ke empat ini menjelaskan tentang Pancasila dari lima pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai – nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomi, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak particular.”

Pasal 28 H ayat (4) Undang – Undang 1945 amandemen ke 4 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun.”

Mengingat bahwa kebudayaan merupakan salah satu hak umat manusia untuk di miliki dan tidak boleh di ambil alih atau diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 amandemen ke-4 menyatakan bahwa :

“Negara memajukan kebudayaan nasional ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budaya.”

⁷H.R.Otje Salman dan Anthon F.Susanto, Teori Hukum : *Mengingat , Mengumpulkan , dan Membuka Kembali*. Refika Aditama,2005,hlm.158.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu tidak lain adalah aturan, maka sudah sewajarnya negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Undang – Undang Dasar 1945 sendiri memberikan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan tersebut di antaranya hak keadilan, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu hak dasar tadi tidak boleh dirampas oleh siapapun karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan di perlakukan sama dimuka hukum. Konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang berkembang sejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan juga memperlihatkan bahwa ilmu – ilmu non hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum. Mochtar Kusumaatmadja sebagai penulis hukum pembangunan yang berpengaruh di Indonesia, menjelaskan pentingnya peranan ilmu - ilmu non- hukum dalam pembentukan hukum pembangunan nasional. Dalam tulisannya yang berjudul “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional” mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat bahkan hukum itu sendiri merupakan pencerminan daripada nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat itu⁸. Atas dasar pikiran ini, menurut

⁸Mochtar Kusumaatmadja, S.H.LL.M dan Dr. B Arief Sidartha, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni,2005,hlm.158.

Mochtar Kusumaatmadja suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan masyarakat tertutup ke suatu masyarakat terbuka, dinamis, dan modern nilai – nilai itu pun sedang dalam perubahan pula, salah satu kemajuan dalam ilmu adalah harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak *World Trade Organization* (WTO) kepada negara – negara untuk tunduk kepada keputusan – keputusan yang WTO buat.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat berbagai konvensi Internasional yaitu : *The Paris Convention for the Protection on Industrial Property*, *Bern Convention*, *Rome Convention*, *Washington Treaty*, *General Agreement Tariff and Trade/GATT*. Terdapat pula *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP'S)* sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral *Agreement Estabilisihing The World Trade Organization (WTO)*.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP'S) sebagai peraturan standar Internasional Perlindungan HKI mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mengatur hak – hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan Internasional pada bidang Kekayaan Intelektual, berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang “Pengesahan *Agreement Estabilisihing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pertemuan – pertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat – pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang bernama “*Green Room*”.

Green Room ini adalah kumpulan negara – negara yang biasa bertemu dalam *ministerial confrence* (selama 2 tahun sekali) negara – negara besar umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi memperbesar cakupan perdagangannya. Negara – negara berkembang sekarang dalam sistem HKI mencoba menyeimbangkan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat yaitu :

1. Prinsip Keadilan (*The Pricinple of Natural Justice*).

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*).

Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan

perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*).

Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kretivitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI bermacam – macam terdiri dari :⁹

1. Undang – Undang No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang – Undang No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang – Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industrial.
4. Undang – Undang No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang – Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten

⁹Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Ghalia Indonesia,Bogor.2010.hlm 2.

6. Undang – Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek
7. Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sistem perlindungan dalam HKI di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu :

1. Sistem Konstitutif yaitu bahwa suatu pendaftaran merupakan suatu keharusan jadi, hak atas suatu ciptaan atau temuan ada setelah adanya suatu pendaftaran. Dalam sistem ini, menimbulkan kepastian hukum.
2. Sistem Deklaratif yaitu bahwa suatu penemuan atau ciptaan pendaftarannya bukan merupakan suatu keharusan sehingga didaftarkan atau tidak tetap, mendapatkan perlindungan asal bisa membuktikan bahwa dialah sebagai penemu atau pencipta pertama. Dalam sistem ini hanya menimbulkan dugaan Hukum.

Hak Cipta termasuk (*deklaratif*) karena tanpa didaftarkan pun secara otomatis telah dilindungi, namun apabila tidak didaftarkan pada saat terjadi suatu permasalahannya tidak ada bukti yang kuat.

Hak Cipta (lambang internasional: ©) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya),

komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu. Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor "keahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Berne, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti

lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk mendapatkan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti telah dimilikinya hak cipta yang sah. Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan orang yg mengakui pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku misalnya dalam hukum di Inggris (*Copyright Designs and Patents Act 1988*) dan hukum di Indonesia (UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 33). Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta.

Menurut Pasal 40 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual secara tersendiri).

Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014).

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "*copyright*", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Berne. Dengan pengecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Berne.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat

misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa.

kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya Hak Cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta. Di Indonesia sendiri hak cipta yang berlaku yaitu sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun sesuai Pasal 58 ayat (1)

Semua perubahan menyangkut kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual terdaftar wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.

Lisensi adalah adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Seperti disebutkan dalam Blac`s Law dictionary¹⁰ , lisensi ini diartikan sebagai :

A personal privilege to do some particular act or series of act atau diartikan “ The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable”.

Dari pengertian diatas, lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut , maka tindakan atau perbuatan tersebut

¹⁰Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. The Lawbook Exchange, Ltd.

merupakan suatu tindakan yang terlarang yang merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Pihak yang menjual atau memberikan lisensi disebut dengan nama Licensor (atau pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan nama license (atau penerima lisensi).

Pengalihan Hak kekayaan Intelektual yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia mencakup:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan atas Hak Kekayaan Intelektual wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak Kekayaan Intelektual terkait, dengan disertai dokumen-dokumen pendukung. Pengalihan hak atas Hak Kekayaan Intelektual terdaftar yang telah dicatat, diumumkan dalam Berita Resmi Hak Kekayaan Intelektual terkait. Tanpa dicatatkan dalam Daftar Umum, pengalihan hak atas Hak Kekayaan Intelektual tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Sebelum pencatatan pengalihan haknya dilaksanakan di Ditjen HKI, pemilik yang baru atas Hak Kekayaan Intelektual yang dialihkan tidak dapat mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran hak atas merek-merek yang dialihkan, tidak dapat mengajukan oposisi terhadap permohonan

merek serupa yang diajukan pihak lain, atau mengajukan perpanjangan pendaftaran merek-merek yang dialihkan.

Menunda pencatatan pengalihan hak di Ditjen HKI dapat juga mengakibatkan penolakan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terkait apabila pemilik baru mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau merek-merek yang dialihkan untuk barang atau jasa sejenis.

Hak Cipta¹¹ adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 1 ayat 1** UUHC No. 28 Tahun 2014). Bahwa didalam Hak Cipta terdapat 2 (dua) hal, yaitu: Pencipta dan Ciptaan, apa itu Pencipta, didalam UUHC No.28 Tahun 2014 disebutkan **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan **Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada Pencipta,

¹¹ Amir Syamsuddin, http://acemark-ip.com/id/news_detail.aspx?ID=116&URLView=default.aspx, diunduh pada senin 17 maret 2016

Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait. Bahwa seperti diketahui didalam UUHC yang baru terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini, dan hal ini sebagaimana termaktub didalam beberapa Pasal pada Undang-undang Hak Cipta yang baru (**UUHC No. 28 Tahun 2014**) yang bertulis Bahwa UUHC No. 28 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait secara menyeluruh, perlindungan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan hukum secara Pidana dan Perdata.

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum baik itu secara pidana maupun perdata yang diatur oleh UUHC No. 28 Tahun 2014?. Bahwa berdasarkan pada **BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa** didalam **Pasal 95 ayat 1** disebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke Pengadilan, Pasal ini merupakan terobosan baru didalam UUHC No. 28 Tahun 2014. Selain itu juga bahwa untuk penyelesaian hak cipta yang salah satu pihaknya berada di luar negeri, diakomodir ketentuan penyelesaiannya didalam **Pasal 95 ayat 4**, yang berbunyi: "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana".

Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Ketentuan tentang Ganti Rugi ini disebutkan didalam **Pasal 99 ayat 1** UUHC No. 28 Tahun 2014. Bagaimanakah bentuk Ganti Rugi yang bisa dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait?, menurut ketentuan Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa: "Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait".

Dan selain itu juga Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait juga bisa mengajukan putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Apasajakah yang bisa dimintakan putusan sela oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait itu?, menurut Pasal 99 ayat 3 UUHC No. 28 Tahun 2014 diterangkan bahwa putusan sela dimintakan ke Pengadilan Niaga untuk; “a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait”.

Disebutkan tentang Penyelesaian Sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang merasa dirugikan juga bisa meminta Penetapan Sementara Pengadilan, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk: a.mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan; b.menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut; c.mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau d.menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

F.Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah – langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara hati – hati dan kritis untuk mencari fakta dan prinsip – prinsip.

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan adalah deskriptif – analitis yaitu seperti yang diterangkan Soerjono Soekanto untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori – teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori – teori baru.¹² Memperoleh gambaran mengenai kewenangan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau fotografer yang menciptakan seni fotografi. Analitis karena menganalisis

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.10.

ketentuan peraturan perundang – undangan yang tercatat dalam analisis kewenangan Pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap fotografi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis – Normatif, yaitu : ¹³Penelitian terhadap asas – asas hukum dilakukan dengan norma – norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas”

Metode pendekatan ini di perlukan karena data yang di gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum hukum atau untuk mencari makna dan member nilai akan hukum tersebut hanya di gunakan konsep hukum dan langkah yang di tempuh langkah normatif.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan penulis dapat mempelajari dan meneliti sumber – sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas guna memperjelas pembahasan dengan mengumpulkan :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundangan – undangan yaitu :
 - a. Undang – Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Kitab Hukum Pidana
 - c. Kitab Hukum Perdata

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42.

- d. Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu penganalisisan bahan hukum primer, berupa buku – buku, makalah, artikel berita, serta karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang di teliti
 - 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.
 - b. Studi Lapangan
- mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan informan yang mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan teknik yang digunakan dalam pengolahan data sekunder dan primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang akurat, jelas, serta representatif adalah :¹⁴

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan masalah hak cipta pada fotografi. Seperti peraturan Perundang – undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, indeks komulatif, biografi, dan lainnya, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan kedua 2006. Hlm.10

resmi. Dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Metode pendekatan ini digunakan denganmengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup Peraturan Perundang – undangan yang meliputi Undang – Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang – Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2014.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain pendapat para ahli ataupun dari hasil – hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan – bahan lainnya yang ada relevansi dengan pokok permasalahannya yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita internet, Koran, majalah, kamus hukum, dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah dapat dipahami secara komprehensif.

- b. Studi lapangan, teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi terkait, serta pengumpulan bahan – bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi Hukum

Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder. Sehingga dapat diketemukan norma hukum *inconcreto* di masyarakat.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data kepustakaan

Alat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kepustakaan yaitu dilakukan untuk menemukan dan memperoleh data – data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah, majalah, surat kabar, internet, dokumen, serta peraturan – peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pembahasan penelitian.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*).

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif, maka analisis data digunakan adalah menggunakan metode analisis yuridis dan analisis desktritif dengan pendekatan kuantitatif yaitu sebagai berikut¹⁵ :

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.152.

- a. Peraturan perundang – undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki peraturan perundang – undangan, yaitu peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Khusumaatmadja Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Komunikasi Universitas Islam Bandung, jalan Taman Sari No.1 Bandung.

2. Penelitian Lapangan

- a. Studio Photo DUV Project, Jalan Halmahera No.13, Bandung
- b. Studio Photo Buqie Post Production, jalan Buah Batu Dalam II No.4, Bandung

